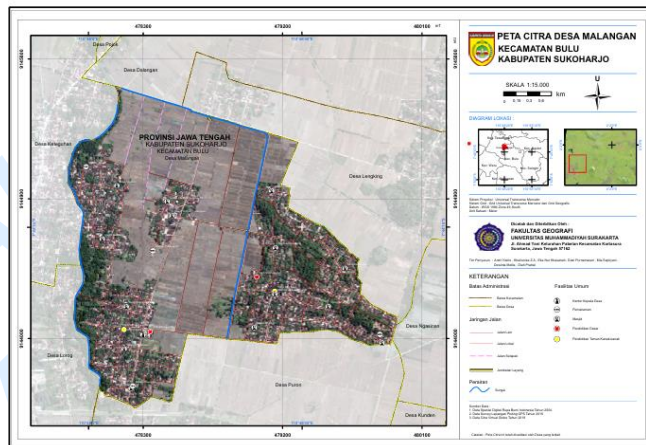


KEHIDUPAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN SOSIAL PKH

Bab dua ini akan dijelaskan mengenai lokasi penelitian di Desa Malangan, permasalahan yang terdapat di wilayah tersebut sehingga dilakukan penelitian ini, kehidupan sosial masyarakat khususnya anggota penerima bantuan PKH di Desa Malangan. Alur pembahasan akan mengalir pada sub bab tentang profil Kelompok 7 penerima bantuan PKH. Lebih lanjut lagi, saya akan memberikan latar belakang informan penelitian yang akan mengungkap pengalaman mereka sebagai individu yang menjadi anggota penerima bantuan sosial PKH di Kelompok 7 di tengah-tengah masyarakat umum lainnya.

2.1 Profil Desa Malangan



Gambar 2.1 Kondisi Geografi Desa Malangan

Sumber: Administrasi Desa Malangan

Desa Malangan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki karakteristik yang khas, di mana sebagian besar masyarakatnya bertani, baik menjadi buruh tani atau mengelola tanahnya sendiri. Desa Malangan merupakan desa yang memiliki wilayah yang cukup besar dan terdiri dari beberapa dusun, Desa Malangan juga memiliki lahan persawahan yang cukup luas, sehingga menjadi ladang pekerjaan bagi masyarakat ketika waktu tanam dan panen tiba. Meskipun tingkat pendidikan masyarakat di Desa Malangan tidak tergolong rendah, mereka tetap mengelola

lahan persawahan sebagai sumber kehidupan mereka sehari-hari, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual. Karena pada dasarnya penghasilan mereka dalam bertani cukup besar.

2.1.1 Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa Malang

Pada kehidupan sosial masyarakat Desa Malang masih mengedepankan budaya gotong-royong, yang mana masih banyak kegiatan kemasyarakatan yang berjalan di dalamnya dan masih banyak warga yang terlibat baik dari generasi tua maupun muda. Masyarakat masih memiliki jiwa saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan kerabat dekat maupun tetangga. Di desa tersebut masih banyak aktivitas yang melibatkan masyarakat, seperti halnya kegiatan 17 agustus atau kemerdekaan, tradisi atau ritual seperti kondangan atau bancakan hingga acara yang menjadi ranah pribadi salah satu warga, seperti halnya acara hajatan yang juga melibatkan masyarakat sekitar. Biasanya acara-acara tersebut melibatkan masyarakat sekitar tanpa upah atau bayaran, mereka membantu atau bekerja secara sukarela.

Tingkat kesejahteraan pendidikan di Desa Malang sendiri sudah difasilitasi oleh desa maupun kecamatan setempat baik dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah ke atas. Hal tersebut menjadi harapan bagi desa maupun pemerintah setempat bahwasannya pendidikan di Desa Malang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat setempat, sehingga mereka sadar bahwasannya pendidikan menjadi modal yang sangat penting. Selain itu, dengan adanya berbagai program bantuan sosial yang mengarah untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, maka diharapkan mereka lebih sadar akan pentingnya pendidikan untuk generasi selanjutnya. Menurut data BPS di Kecamatan Bulu sendiri tingkat pendidikan pada tahun 2024/2025 terdapat 391 jiwa duduk di bangku sekolah taman kanak-kanak, 2.167 jiwa duduk di bangku sekolah dasar, 1.079 jiwa duduk di bangku sekolah menengah pertama, 829 jiwa duduk di bangku sekolah menengah atas, dan 1.002 jiwa yang duduk di bangku sekolah menengah kejuruan.

Di Desa Malang sendiri, rata-rata penduduk bekerja di sektor *non* formal seperti halnya petani, pedagang, buruh, dan lain sebagainya. Penduduk dengan stratus miskin merupakan mereka yang bekerja di sektor non formal seperti halnya

petani dan buruh, baik buruh tani maupun buruh bangunan. Salah satu alasan mereka masuk ke dalam kategori miskin yaitu ketidakpastian pekerjaan dan pendapatan setiap hari atau setiap bulannya. Berdasarkan data DTSEN yang hanya dapat diakses oleh pemerintah Desa Malangan, jumlah penduduk yang tercatat dalam sistem tersebut mencapai 3.772 jiwa, yang mana data tersebut kemudian diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok desil yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Data DTSEN kemudian diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok desil yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Desil sendiri terdapat beberapa kelompok seperti halnya, desil menengah ke bawah yaitu desil 5-1. Sementara, pada kelompok desil yang lebih tinggi, yaitu desil 6-10 tercatat sebagai keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas, atau dapat dikatakan sebagai keluarga yang mampu. Dalam Data DTSEN masyarakat Desa Malangan pengelompokkan tersebut menjadi dasar dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat desa serta sebagai acuan dalam penentuan sasaran berbagai program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah.

Pada data DTSEN Desa Malangan menunjukkan bahwasannya terdapat kelompok desil 1 dengan jumlah 390 individu, desil 2 terdapat 457 individu, desil 3 dengan total 511 individu, desil 4 dengan jumlah 458 individu, dan desil 5 260 individu. Selain itu, terdapat penduduk dengan desil 6-10 dengan jumlah 1.601 individu. Dari desil-desil tersebut, maka menjadi pengukur kesejahteraan ekonomi dari masyarakat Desa Malangan. Penduduk dengan desil 1 merupakan mereka yang berstatus sangat miskin dan biasanya dari keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tidak stabil. Desil 2 merupakan penduduk dengan status miskin yang memiliki pendapatan rendah dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Desil 3 merupakan penduduk dengan status hampir miskin yang juga rawan jatuh miskin akibat kenaikan harga atau PHK. Desil 4 merupakan penduduk dengan status rentan miskin dengan kondisi relatif stabil tetapi rentan terdampak bencana. Desil 5 merupakan penduduk dengan status pas-pasan, namun sudah berada pada ambang aman ekonomi. Dan desil 6-10 merupakan penduduk dengan status menengah ke atas dan tidak diprioritaskan untuk bansos reguler.

Meskipun Desa Malangan menjadi salah satu desa yang memiliki penghasilan dalam bertani yang cukup besar, tidak menjadikan wilayah tersebut

terbebas dari kemiskinan, di mana masih banyak ditemukan sebagian dari mereka dalam keadaan miskin dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hal tersebut, mereka menjadi salah satu sasaran program pemerintah, seperti halnya PKH. Namun, nyatanya banyak juga ditemukan bahwa penerima bantuan PKH juga berasal dari kalangan menengah ke atas, dan tidak banyak ditemukan dari mereka melakukan graduasi. Meskipun pemerintah dan pendamping kelompok PKH telah melakukan evaluasi mengenai permasalahan tersebut nyatanya tidak banyak yang merubah para anggota PKH dari kalangan menengah ke atas untuk keluar dari penerima bantuan sosial. Bahkan orang yang lebih membutuhkan nyatanya tidak masuk ke dalam daftar penerima bantuan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Malangan dengan fokus pada Kelompok 7 penerima bantuan sosial PKH. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yang pertama Desa Malangan merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah penerima PKH yang cukup tinggi, sehingga mengenai fenomena sikap ketergantungan dan kemiskinan berkelanjutan dapat diamati secara lebih nyata dan mendalam. Kedua, secara geografis lokasi penelitian relatif dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat mempermudah dalam proses pengumpulan data, baik melalui observasi maupun wawancara mendalam. Kedekatan lokasi juga menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk melakukan interaksi yang lebih intens dengan para informan dan data yang diperoleh dapat lebih mendalam dan akurat. Dan yang ketiga yaitu, Kelompok 7 PKH di Desa Malangan memiliki karakteristik penerima bantuan yang beragam dari segi usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya yang dapat memberikan gambaran yang beragam mengenai dinamika penerimaan bantuan sosial di tingkat rumah tangga.

2.1.2 Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Malangan

Desa Malangan merupakan salah satu wilayah yang memiliki hasil alam yang cukup melimpah, salah satu sumber alam yang ditekuni dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar saat ini yaitu pertanian, di mana masyarakat di Desa Malangan sebagian besar memiliki lahan persawahan. Mereka mengolah tanah persawahan tersebut secara mandiri dan terdapat beberapa masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani yang bekerja di lahan persawahan milik orang lain. Maka, kehidupan sosial yang berjalan saat ini di dalam masyarakat Desa Malangan

khususnya pada anggota Kelompok 7 penerima bantuan sosial tidak jauh dari bidang pertanian, yang mana beberapa dari mereka mengandalkan hasil pertanian untuk dapat bertahan hidup. Mereka yang bekerja sebagai buruh tani umumnya hanya bekerja di lahan persawahan milik saudara sendiri, tetangga, maupun orang lain yang masih satu wilayah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasannya kehidupan sosial masyarakat Desa Malangan masih berada pada radar saling menguntungkan satu sama lain, dapat dilihat dari hubungan sosial ekonomi yang terjalin antara masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas dan ekonomi menengah ke bawah.

Selain bekerja di bidang pertanian, masyarakat Desa Malangan juga bekerja di bidang lainnya, seperti halnya sebagai pedagang, hingga di sektor formal. Beberapa dari mereka yang memiliki lahan persawahan tidak hanya mengandalkan sektor pertanian saja tetapi juga mengambil pekerjaan lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pada dasarnya hasil panen dari lahan persawahan tidak menentu dan tidak dapat diandalkan setiap saat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mau tidak mau masyarakat harus mengambil pekerjaan sampingan, seperti berdagang, buruh bangunan, hingga menjadi pegawai atau di sektor formal lainnya. Bagi mereka yang memiliki lahan persawahan dan memiliki pekerjaan sampingan lainnya umumnya bisa memenuhi kebutuhan primer hingga sekunder, bahkan beberapa dari mereka hingga bisa mengantarkan anak-anak mereka untuk bisa berada di bangku universitas untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Hal tersebut diharapkan anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan bisa memiliki masa depan yang lebih baik dibanding orang tua mereka.

Desa Malangan juga menjadi salah satu wilayah pedesaan yang maju baik dari pendidikan maupun lainnya. Sudah banyak dari masyarakat Desa Malangan yang memiliki pendidikan tinggi hingga ke bangku perkuliahan. Menariknya, meskipun sudah banyak generasi muda yang sudah memiliki pendidikan yang tinggi tidak menciptakan jarak antara masyarakat generasi tua dan muda, mereka tetap berjalan dengan radar mereka masing-masing dan bisa memposisikan diri. Seperti halnya beberapa adat yang masih berjalan hingga saat ini di Desa Malangan yang tidak mendapatkan tantangan dari generasi muda, meskipun mereka memiliki

pola berpikir yang baru dan lebih maju. Sebaliknya, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh generasi muda di setiap dukuh di Desa Malangan selalu mendapatkan dukungan secara penuh dari masyarakat generasi tua maupun dari aparat desa. Kegiatan tersebut berupa acara 17-an dan lain sebagainya.

2.2 Dinamika Kehidupan Penerima Bantuan PKH

Desa Malangan memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi, sehingga jumlah penerima bantuan di desa tersebut juga dapat dikatakan tinggi. Masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah tidak hanya berasal dari PKH saja tetapi juga dari program pemerintah lainnya seperti BLT, BPNT, KIP, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang menerima bantuan sosial memiliki kewajiban masing-masing sebagai anggota penerima bantuan, seperti halnya penerima bantuan sosial PKH yang harus menjalankan beberapa kewajiban mereka sebagai anggota.

Sebagai penerima bantuan, mereka harus menjalankan beberapa tugas, seperti mengisi laporan melalui *Google Form* maupun laporan tertulis, melakukan laporan jumlah dana yang mereka dapatkan, hingga melakukan laporan secara rutin setiap dana bantuan turun dengan berfoto di depan rumah yang juga memperlihatkan stiker keluarga penerima bantuan dengan menggunakan aplikasi yang sudah ditentukan yang dilengkapi dengan jam, tanggal, tahun, lokasi, dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut bertujuan agar dapat menjadi pendorong bagi penerima bantuan untuk memiliki sikap disiplin, mampu meningkatkan pengetahuan, hingga memperkuat kapasitas keluarga penerima manfaat atau KPM dalam mengelola bantuan yang diterima.

Selain itu, kewajiban yang harus mereka lakukan yaitu mengikuti kegiatan rutin seperti menghadiri rapat rutin bulanan yang disebut dengan FDS (*Family Development Session*), yang diadakan seluruh anggota satu kelompok dan didampingi oleh pembina kelompok. Kegiatan rapat rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali dan tidak ditentukan tanggal pasti di setiap bulannya, di mana tanggal dilaksanakan pertemuan rutin tersebut akan diumumkan oleh pembina dari kelompok tersebut. Pada pertemuan rutin tersebut, KPM diberikan beberapa materi seperti halnya materi mengenai kesehatan, pendidikan, pengasuhan anak, hingga

pengelolaan ekonomi rumah tangga. Tujuan diadakannya pertemuan rutin kelompok yaitu agar dapat menjadi wadah bagi mereka untuk bisa menyampaikan kendala, berdiskusi, hingga saling bertukar pengalaman

Bahkan terdapat maksimal anggota diperbolehkan untuk absen atau tidak menghadiri pertemuan rutin. Bagi mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH wajib untuk menghadiri pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulan, dan diperbolehkan untuk tidak hadir atau digantikan oleh orang lain jika ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan oleh anggota tersebut. Pada dasarnya, kehadiran penerima bantuan dalam setiap kegiatan PKH menjadi salah satu indikator penting dalam proses pelaksanaan program. PKH merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat atau disebut dengan *conditional cash transfer*, yang mana program tersebut menuntut adanya komitmen dari keluarga penerima bantuan untuk bisa memenuhi kewajiban tertentu, seperti halnya laporan rutin atau catatan penting dalam proses rapat rutin. Jika penerima bantuan tidak hadir dalam pertemuan rutin kelompok secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas maka akan mendapatkan sanksi administratif. Karena pada dasarnya pertemuan rutin dibentuk untuk menjaga kedisiplinan dan memastikan bahwasannya setiap penerima manfaat benar-benar mengikuti proses pembinaan yang menjadi inti dari program bantuan sosial PKH.

Terdapat proses yang menjadi bagian penting dari aktivitas penerima bantuan PKH yaitu pencairan dana bantuan, yang mana proses pencairan dana yang awalnya menggunakan tunai kini sudah menggunakan *non* tunai. Dana PKH disalurkan melalui rekening bank ke masing-masing kartu ATM yang sudah dipegang oleh penerima bantuan. Pada Kelompok 7 PKH Desa Malangan menggunakan rekening dari Bank Negara Indonesia atau BNI, yang mana kartu ATM sudah difasilitasi jadi penerima tidak perlu membuat rekening masing-masing ke bank secara mandiri.

Pencairan bantuan biasanya dilakukan selama empat kali dalam rentan waktu satu tahun atau setiap tiga bulan sekali. Tetapi, setiap daerah tidak memiliki kesamaan waktu pencairan, hal tersebut bertujuan agar menghindari pembbludakan jumlah penerima bantuan di bank-bank atau ATM terdekat, sehingga setiap kelompok atau setiap daerah desa bisa memiliki perbedaan waktu pencairan

bantuan. Bagi mereka yang kesulitan dalam mengakses layanan perbankan atau memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penggunaan ATM, mereka akan pergi ke agen BRI Link untuk membantu mereka dalam pencairan dana bantuan, biasanya proses tersebut akan membutuhkan biaya tambahan berupa potongan dana yang sudah cair. Potongan atau biaya yang biasanya dibayar akan disesuaikan dengan jumlah dana yang ditarik, umumnya di angka Rp 5.000 hingga Rp 10.000 sekali penarikan.

Meskipun tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat, anggota nyatanya tidak menghindarkan mereka dari tanggapan-tanggapan kurang baik dari masyarakat lainnya yang *non* penerima bantuan sosial. Tanggapan-tanggapan kurang baik tersebut umumnya muncul dari adanya salah satu atau beberapa anggota penerima bantuan sosial yang dianggap memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik seperti menengah ke atas dan dapat memenuhi kebutuhannya dari primer hingga sekunder tanpa kekurangan dan mengalami kesulitan, namun tetap menerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yang dianggap salah sasaran. Di mana bagi mereka yang memiliki keadaan ekonomi menengah ke atas dan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial PKH, diharapkan untuk mengundurkan diri atau disebut dengan graduasi mandiri. Bagi mereka yang mengundurkan diri maka dapat digantikan dengan nama lain yang dirasa lebih pantas untuk menjadi penerima bantuan sosial PKH, sehingga tidak sedikit data-data penerima bantuan PKH mengalami kesalahan.

Penerima bantuan sosial PKH umumnya bekerja di sektor *non* formal, seperti halnya petani maupun buruh tani, dan lain sebagainya yang memiliki penghasilan tidak tetap atau penghasilan yang tidak bisa digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga seperti suami, istri, dan anak-anak. Maka dari itu, dengan adanya bantuan sosial ini menjadi penolong bagi perekonomian mereka saat ini dalam jangka yang cukup panjang, di mana seseorang atau keluarga dapat menjadi penerima bantuan sosial PKH dari seorang istri mengandung anaknya hingga anak lulus dari bangku sekolah.

Oleh karena itu, dari bantuan tersebut tidak sedikitnya membantu membangkitkan ekonomi anggota penerima bantuan PKH yang berada dalam keadaan miskin ataupun miskin berat, mereka bisa memenuhi kebutuhan primer

hingga lainnya seperti pendidikan, makan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam fenomena tersebut tidak sedikitnya memunculkan sikap ketergantungan penerima bantuan atas bantuan dana yang mereka terima dari pemerintah, tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan dana bantuan dengan angka yang cukup besar, yang tidak hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan primer atau sekunder saja, tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan sampingan lainnya. Bahkan dana bantuan mereka terima bisa lebih besar dibandingkan dengan gaji mereka dari hasil kerja.

2.2.1 Proses Perkembangan Program Bantuan Sosial PKH

Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat atau bisa disebut dengan *Conditional Cash Transfer/CCT* yang dirancang oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Perihal program PKH dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat yang memberikan insentif keuangan kepada keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan (Rasji, Chang, & Fredeica, 2025). Bantuan sosial PKH menjadi salah satu tujuan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan, rendahnya pendidikan, hingga kurangnya perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak menjadi permasalahan yang cukup besar di Indonesia, sehingga pemerintah berupaya untuk mengatasi beberapa masalah tersebut dengan memunculkan program bantuan sosial PKH sebagai salah satu solusi.

Pada uji coba program bantuan sosial PKH, pertama kali diujicobakan di 7 provinsi dan 48 kabupaten/kota dengan jumlah penerima sekitar 388 ribu rumah tangga. Tujuh provinsi yaitu: Gorontalo, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur (Halawa, 2022). Hal tersebut didukung oleh Bank Dunia melalui *loan agreement* sebagai salah satu bentuk kerja sama internasional untuk memperkuat kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Kemudian, program bantuan sosial PKH ini dianggap berhasil memberikan dampak positif bagi penerimanya. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya anak-anak yang mulai bersekolah dari keluarga miskin. Selain itu dari bantuan sosial tersebut dapat memperbaiki akses layanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, hingga lansia.

Seiring dengan berjalannya waktu, program bantuan sosial PKH ini mulai mencakup lebih luas. Pada tahun 2013 hingga 2016, terdapat jumlah penerima bantuan sosial tersebut semakin meningkat secara signifikan dengan sasaran keluarga miskin dan rentan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2017 menjadi tahun peralihan bantuan PKH, yang mana sistem penyaluran yang berubah dari yang awalnya menggunakan sistem tunai menjadi *non* tunai dengan melalui mekanisme perbankan. Penerima harus mengambil uang bantuan yang diterima di bank atau bisa melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sistem peralihan tersebut dianggap lebih efisien dan mempermudah pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan mempermudah penerima dalam menerima bantuan PKH. Perubahan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi atau akuntabilitas namun juga bertujuan untuk mendorong literasi keuangan bagi penerima bantuan PKH.

Pada tahun 2019, bantuan sosial PKH diintegrasikan bersama program bantuan lainnya melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)¹³ yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan yang sama. Bantuan sosial PKH menjadi salah satu program unggulan yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan bersama dengan program bantuan sosial lainnya seperti halnya BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)¹⁴ hingga KIP (Kartu Indonesia Pintar)¹⁵. Hingga saat ini bantuan-bantuan sosial tersebut saling berkaitan satu sama lain. Seperti halnya, setiap penerima bantuan sosial PKH yang memiliki anak maka anaknya lebih diprioritaskan dalam mendapatkan bantuan sosial KIP. Dan jika penerima bantuan sosial PKH sudah tidak dinyatakan sebagai penerima bantuan PKH atau graduasi, maka pada masanya bisa mendapatkan kesempatan untuk sebagai penerima bantuan sosial BPNT.

Bagi masyarakat, khususnya di Desa Malangan, adanya bantuan sosial PKH dapat membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat yang berstatus miskin atau rentan. Dalam program bantuan sosial PKH, penerima bantuan dikelompokkan

¹³ KKS (Kartu Keluarga Sejahtera): Kartu elektronik/debit yang digunakan untuk menyalurkan dana bantuan.

¹⁴ BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai): Bantuan yang diterima masyarakat dalam bentuk beras atau telur.

¹⁵ KIP (Kartu Indonesia Pintar): Bantuan Sosial pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pendidikan anak dari keluarga miskin/kurang mampu.

dalam Kelompok Penerima Manfaat atau KPM, yang mana kelompok tersebut secara rutin mengikuti pertemuan kelompok atau bisa disebut dengan FDS. Tujuan dari program pendampingan ini adalah untuk dapat memberikan dampak positif kepada keluarga penerima bantuan PKH dalam berbagai aspek keterampilan dan juga kemampuan, mengoptimalkan dan melatih pengelolaan bantuan yang diterima dan menambah wawasan bagi keluarga penerima bantuan PKH untuk senantiasa dapat mandiri dan menciptakan pribadi yang unggul (Fitriani, Billah, & Rahayu, 2023). Penerima bantuan sosial PKH ini merupakan bantuan yang didapatkan oleh perempuan yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak atau sedang mengandung. Oleh karena itu, arahan-arahan tersebut dianggap bermanfaat untuk masa depan keluarga dan membawa perubahan yang lebih baik.

Sejak tahun 2007, PKH menjadi salah satu bantuan yang masih berjalan hingga saat ini. PKH juga menunjukkan bagaimana kebijakan sosial di Indonesia terus beradaptasi bersamaan dengan tantangan zaman yang terus berjalan. Pada awalnya bantuan sosial PKH hanya sebagai salah satu bantuan yang sekedar uji coba terbatas, tetapi bantuan tersebut kini menjadi salah satu program unggulan nasional yang hingga kini sudah menyentuh jutaan penerima dengan status keluarga miskin dan rentan. Keberjalanan program tidak sepenuhnya tanpa tantangan, beberapa tantangan harus tetap dihadapi dalam keberjalan program bantuan sosial PKH, seperti halnya mulai munculnya budaya ketergantungan pada bantuan, hingga hal tersebut dapat berpotensi mengakibatkan menghambat kemandirian ekonomi bagi penerima bantuan.

2.2.2 Kelompok 7 PKH Desa Malang

PKH merupakan suatu program bansos yang mempunyai syarat tertentu yaitu bumil, anak balita, anak dalam masa pendidikan yang terkategori sangat miskin untuk berbagai layanan kesehatan dan berbagai fasilitas layanan pendidikan (Nadhifah & Mustofa, 2021). Program bantuan sosial PKH ini diberikan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, dengan bantuan PKH ini diharapkan penerima bantuan dapat memperbaiki hingga mengembangkan ekonomi mereka. Kelompok 7 merupakan salah satu kelompok PKH dengan anggota penerima bantuan sosial yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kelompok ini terdiri

dari beberapa keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah kebawah atau miskin dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap bantuan sosial, khususnya PKH. Pada kelompok ini menunjukkan adanya budaya ketergantungan yang telah terbentuk secara sistematis. Di mana hal tersebut ditunjukkan dengan adanya bantuan sosial PKH tidak hanya menjadi penopang ekonomi namun juga sebagai bagian dari pola hidup mereka.

Pada pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, penerima bantuan PKH di Kelompok 7 tidak hanya mengandalkan bantuan sosial untuk kehidupan primer namun juga mengandalkan bantuan sosial PKH untuk kehidupan sekunder, sehingga hal tersebut berpengaruh pada pembentukan pola pikir dan perilaku yang pasif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang tidak semakin baik namun malah sebaliknya. Sebagian dari mereka yang tidak berupaya untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan keterampilan karena merasa cukup atas bantuan yang mereka terima secara rutin. Hal tersebut menunjukkan adanya fenomena budaya ketergantungan, yang mana bantuan bukan dianggap sebagai hak tetap dan mereka dapatkan secara rutin, bukan sebagai bantuan sementara yang harus mereka gunakan untuk mengembangkan diri sehingga membentuk ekonomi mandiri.

2.3 Profil Informan

Seperti yang telah dicantumkan sebelumnya, bahwasannya penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini memiliki kriteria yang diperlukan dalam penentuan informan, di antaranya: (1) seorang perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak; (2) sebagai penerima bantuan sosial PKH; (3) aktif dalam kelompok PKH. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan lima anggota Kelompok 7 PKH Desa Malangan yang masih aktif dalam menerima bantuan PKH hingga saat ini dan menjadi informan dalam penelitian ini.

2.3.1 Nur Hayati (Ketua Kelompok 7/Penerima PKH)

Saat pertemuan pertama, setelah saya dan dia sudah lama tidak bertemu, akhirnya kita kembali bertemu untuk melakukan wawancara di rumah dimana sekarang dia tinggal bersama anak-anak dan suaminya saat ini. Mbak Nur Hayati, biasanya dipanggil dengan nama Mbak Nur, dia saat ini berusia 32 tahun dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Mbak Nur merupakan salah satu

warga Desa Malangan dan menjadi anggota aktif di Kelompok 7 PKH Desa Malangan. Sebelum menikah, Mbak Nur pernah bekerja sebagai salah satu karyawan di Alfamart Serang, dengan hal tersebut Mbak Nur juga menyatakan bahwasannya gajinya saat itu termasuk gaji yang cukup tinggi dengan penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,- perbulan. Selain itu, Mbak Nur juga memiliki riwayat pendidikan Sekolah Menengah Atas atau SMA, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup baik di tanah rantau. Setelah bekerja selama lebih dari 2 tahun dan hanya mendapatkan iming-iming akan menjadi karyawan tetap, akhirnya Mbak Nur memiliki pasangan yang berasal dari orang Sunda, karena kedua orang tuanya tidak mengizinkan mereka untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, maka Mbak Nur kembali ke desa dan menikah dengan suaminya saat ini yang merupakan warga dari Desa Malangan, sehingga Mbak Nur, suami, dan anak-anaknya saat ini merupakan warga dengan kependudukan Desa Malangan.

Setelah beberapa tahun menikah, dan anaknya menginjak usia balita, Mbak Nur dinyatakan sebagai penerima bantuan sosial PKH dari pemerintah. Pada saat itu bantuan tersebut dianggap menjadi penolong bagi perekonomian keluarga, saat itu dikatakan bahwasannya anaknya sedang sakit dan membutuhkan banyak biaya. Maka dari itu, dengan adanya bantuan PKH yang diterima dianggap mampu sedikitnya membantu mereka untuk bisa membeli keperluan anak dan keperluan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Mbak Nur mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2018 hingga saat ini, dana yang didapatkan oleh Mbak Nur saat ini yaitu komponen balita dengan jumlah RP 750.000,- dan komponen SD dengan jumlah RP 225.000,-. Bantuan tersebut tidak setiap bulan diterima, yang mana bantuan tersebut umumnya diterima pada tiga bulan sekali. Namun, ketentuan pencairan dana PKH biasanya berubah-ubah, sempat cair setiap dua bulan sekali dan saat ini kembali pada tiga bulan sekali. Ketika dana bantuan PKH cair pada dua bulan sekali, maka besar dana yang didapatkan biasanya dikurangi RP 100.000,- setiap pencairan. Seperti halnya yang awalnya diterima komponen balita adalah Rp 750.000,- maka yang cair hanya Rp 650.000,- atau bahkan hanya sekitar Rp 500.000,-.

Sebagai penerima bantuan sosial PKH dengan usia yang masih muda, yang mana saat itu Mbak Nur menerima bantuan sosial PKH sejak dirinya masih berusia

kurang lebih 25 tahun, muncul beberapa kekhawatiran sendiri. Saat ini, dengan usia yang masih bisa dikatakan muda maka bantuan sosial PKH belum menjadikan dia ketergantungan pada bantuan tersebut. Namun, di kemudian hari tidak menutup kemungkinan bahwasannya ketergantungan tersebut muncul pada dirinya atas bantuan yang dia terima selama kurang lebih sudah 7 tahun saat ini. Bantuan yang tidak bisa dikatakan besar dan juga tidak bisa dikatakan kecil, namun dengan bantuan tersebut bisa membantu kehidupan sehari-hari Mbak Nur dan keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Saat menerima dana PKH, Mbak Nur tidak memberitahu suami, hal tersebut bertujuan jika suaminya tidak ada pekerjaan maka uang dari bantuan sosial PKH dapat digunakan untuk persiapan ketika tidak ada uang yang dihasilkan oleh suaminya.

Ketakutan lain juga muncul, bahwasannya terdapat beberapa pengalaman yang pernah dia lihat sebelumnya, ketika seorang istri mendapatkan bantuan PKH maka suaminya tidak mau lagi untuk bekerja dan tidak memberikan nafkah materi kepada istrinya, hal tersebut disebabkan karena anggapan yang muncul dari suami bahwasannya istrinya sudah memiliki uang sendiri dan bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Mbak Nur memiliki ketakutan-ketakutan tersendiri jika suatu hari dia mengalami hal tersebut, sehingga dia memilih untuk tidak memberi tahu suaminya jika dana PKH sedang cair. Namun, Mbak Nur juga mengatakan bahwasannya jika terdapat kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dibutuhkan suaminya dan uang yang dimiliki hanya dari bantuan PKH maka yang digunakan adalah uang bantuan tersebut, seperti halnya butuh untuk membeli ban dan lain sebagainya.

Sebagai penerima bantuan PKH dan memiliki anak dengan usia balita dan SD, pada saat itu dia harus menjalankan beberapa kewajibannya sebagai penerima. Seperti halnya, dia harus membuat laporan keuangan, yang mana laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan fakta yang ada. Laporan keuangan dibuktikan dengan nota-nota hasil pembayaran. Seperti halnya nota pembelian susu untuk anak balita, nota pembayaran sekolah, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan anak-anak. Namun, saat ini laporan keuangan tersebut tidak diperhatikan, yang mana nota bukti pembayaran yang digunakan untuk kebutuhan pokok kini tidak lagi diminta sebagai laporan keuangan dalam penggunaan dana bantuan, maka dari itu hasil dana

bantuan sosial yang diterima tidak hanya digunakan untuk membeli atau membayar kebutuhan anak-anak, tetapi bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya yang saat itu dibutuhkan.

Perekonomian keluarga yang tidak stabil tersebut disebabkan oleh penghasilan yang tidak tetap, yang mana peran suami sangat diandalkan dalam mencari nafkah untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Mbak Nur sendiri setelah memiliki anak memutuskan untuk tidak bekerja dan fokus untuk membesarkan anak-anaknya atau sebagai ibu rumah tangga, sehingga pemasukan utama berasal dari suami dan saat ini dibantu dengan adanya bantuan sosial PKH yang diterimanya dari 2018 hingga saat ini. Suaminya yang bekerja sebagai buruh seperti buruh bangunan dan buruh tani, menjadikan penghasilan yang didapatkan setiap bulannya tidak menentu, tidak setiap saat atau setiap hari suaminya mendapatkan pekerjaan. Tetapi, upah yang didapatkan suami Mbak Nur ketika bekerja umumnya satu harinya yaitu kurang lebih Rp 100.000,- hingga Rp 150.000,-. Penghasilan yang belum bisa menutup kebutuhan sehari-hari seperti makan, biaya sekolah anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, yang akhirnya terbantu dengan bantuan sosial PKH yang Mbak Nur terima.

Pada proses penerimaan bantuan PKH, saat itu dia langsung mendapatkan surat dari pemerintah, sehingga tidak dari hasil rekomendasi perangkat desa atau lain sebagainya. Namun, awalnya Mbak Nur mengalami kendala karena nama yang terdata tidak lengkap, sehingga mempersulit dana bantuan yang akan dicarikan. Hal tersebut berdampak pada beberapa kali Mbak Nur tidak bisa mendapatkan dana bantuan PKH, sehingga hal tersebut harus dibantu oleh pendamping kelompok untuk bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Akhirnya, pada tahun 2022, Mbak Nur sudah memiliki data yang lengkap mengenai namanya sebagai penerima bantuan sosial PKH, sehingga kendala seperti itu tidak terjadi lagi.

Mbak Nur menyatakan ketidakadilan yang dirasakannya sebagai penerima bantuan PKH murni, atau anggota penerima bantuan PKH yang hanya mendapatkan dana PKH saja, tidak dengan bantuan lainnya yang biasanya disebut dengan BPNT. BPNT merupakan salah satu bantuan sosial yang masih bagian dari PKH, yang mana seorang penerima bantuan PKH bisa mendapatkan bantuan BPNT secara bersamaan. Dengan hal tersebut maka bantuan yang diterima oleh seseorang maka

akan semakin besar. Oleh karena itu, Mbak Nur berharap bahwasannya jika yang satu bisa mendapatkan PKH dan BPNT maka seharusnya lainnya juga mendapatkan BPNT, dan tidak hanya PKH murni saja.

2.3.2 Saminah (Penerima PKH Lansia)

Mbah Saminah merupakan salah satu penerima bantuan sosial PKH di Kelompok 7 Desa Malangan dengan golongan lansia. Mbah Saminah saat ini berusia 70 tahun dan sudah tidak memiliki suami, atau berstatus janda. Saat ini dia tinggal di Dukuh Ngoro Oro bersama anak, menantu, dan cucunya. Mbah Saminah mendapatkan bantuan sosial PKH sebelum suaminya meninggal hingga saat ini, kurang lebih sudah menjadi penerima bantuan PKH selama 5 tahun sejak tahun 2020. Saat ini Mbah Saminah hanya mengandalkan uang dari bantuan sosial PKH, pasalnya dia tidak bekerja dan tidak mendapatkan uang dari anak-anaknya. Maka dari itu, bantuan PKH dianggap sangat berarti bagi dirinya, dengan bantuan tersebut maka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Mbah Saminah meskipun tidak sepenuhnya. Mbah Saminah saat ini memiliki 2 sapi sebagai ternaknya, namun dengan sapi tersebut tidak bisa menghasilkan uang dengan cepat dan tidak dapat digunakan untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Aktivitas setiap harinya, Mbah Saminah mencari makanan berupa rumput untuk sapi-sapinya. Namun, hal tersebut tidak dilakukannya sendiri, ada anak yang saat ini tinggal bersama Mbah Saminah dan membantunya untuk merawat sapi-sapinya hingga saat ini. Selain mencari rumput untuk sapi, Mbah Saminah juga sering kali ke sawah untuk melihat sawahnya. Namun, dengan keadaan yang saat ini sudah mulai tua, Mbah Saminah mengurangi kegiatannya di sawah, saat ini kegiatan di persawahan dipegang penuh oleh anaknya yang bersedia membantu. Dengan penghasilan yang tidak pasti, maka dari itu PKH merupakan salah satu jalan keluar bagi Mbah Saminah terhadap keterpurukan ekonomi. Mbah Saminah mendapatkan pencairan dana PKH seperti penerima bantuan PKH pada umumnya setiap tiga bulan sekali dengan jumlah Rp600.000,-. Maka jumlah bantuan tersebut, Mbah Saminah mengakui bahwasannya uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama tiga bulan, akan tetapi setidaknya membantu dirinya untuk bisa membeli makanan sehari-hari.

2.3.3 Iswanti (Penerima PKH)

Mbak Iswanti merupakan salah satu penerima bantuan sosial PKH sejak tahun 2018 hingga saat ini. Dia tinggal di Dukuh Ngoro Oro bersama suami dan kedua anaknya yang masih aktif di bangku pendidikan. Mbak Iswanti saat ini berusia 45 tahun dengan memiliki anak paling kecil yang masih duduk di bangku kelas dua sekolah dasar. Saat ini, Mbak Partini hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah, suami, dan anak-anaknya.

Meskipun hanya sebagai ibu rumah tangga, Mbak Iswanti nyatanya juga bisa menghasilkan uang dari rumah. Mbak Iswanti bekerja di salah satu pabrik sarung dengan membantu untuk menali benang-benang yang sudah dimotif, pekerjaan tersebut biasanya dilakukan oleh ibu-ibu sekitar yang hanya sebagai ibu rumah tangga, pasalnya pekerjaan tersebut umumnya dilakukan di rumah. Dengan memanfaatkan hasil pertanian dan sumber daya alam yang ada. Sedangkan, suami Mbak Partini bekerja sebagai buruh yang biasanya bekerja di bidang pertanian, bangunan, dan lain sebagainya. Jika bekerja, suami Mbak Iswanti setiap harinya bisa menghasilkan Rp100.000,- - Rp120.000,- per harinya. Namun, dengan penghasilan tersebut dan tanpa memiliki tanah atau lahan persawahan untuk ditanami padi atau tanaman lainnya maka penghasilan yang dihasilkan keduanya tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.3.4 Tuginem (Mantan Penerima Bantuan PKH)

Mbak Tuginem merupakan salah satu penerima bantuan sosial PKH, namun saat ini dia tidak lagi menjadi penerima bantuan sosial PKH karena dana bantuan yang dia terima dibekukan oleh pihak pusat tanpa alasan yang jelas. Mbak Tuginem memiliki satu anak yang saat ini menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan masih menerima bantuan sosial lainnya yang berupa KIP/PIP. Mbak Tuginem sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga hanya mengandalkan penghasilan dari suami dan hasil persawahan yang tidak menentu. Jika tidak memiliki uang, maka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, dia biasanya hanya mengandalkan bantuan KIP yang sudah diterima anaknya dari sekolah. Saat ini, Mbak Tuginem dan keluarganya masih tinggal bersama orang tua dan saudara lainnya di rumah yang sama. Meskipun dengan ekonomi yang belum sejahtera, Mbak Tuginem tetap tidak bisa menerima bantuan sosial PKH. Namun, Mbak

Tuginem memahami bahwasannya pemberhentian bantuan tersebut disebabkan oleh jangka waktu penerimaan bantuan yang sudah lama. Sehingga, sebelum Mbak Tuginem melakukan graduasi maka bantuan tersebut sudah dihentikan secara langsung oleh pihak pusat.

2.3.5 Yoga (Petugas Operator/DTSEN)

Pak Yoga merupakan salah satu petugas desa yang bertugas dalam permasalahan bantuan sosial di Desa Malangan. Pak Yoga salah satu warga Desa Malangan yang mengabdikan dirinya pada Desa Malangan, dulunya ayah Pak Yoga adalah seorang lurah di Desa Malangan, namun saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai lurah. Pak Yoga berusia 32 tahun dengan pendidikan terakhir SMA, yang mana desa sendiri tidak memiliki aturan khusus mengenai jenjang pendidikan yang dimiliki oleh karyawan atau calon karyawannya. Karyawan pemerintahan desa pada dasarnya memiliki pendidikan minimal SMA dan umumnya memiliki pendidikan Sarjana atau S1. Pak Yoga biasanya bertugas dalam membantu masyarakat penerima bantuan sosial yang memiliki kesulitan dalam proses penerimaan bantuan. Biasanya, informasi yang disampaikan oleh BPS atau Dinas Sosial akan disampaikan oleh Pak Yoga kepada warga penerima bantuan. Pihak desa pada dasarnya merupakan suruhan dari Dinas Sosial untuk melihat bagaimana pola kehidupan dari masyarakat itu sendiri, karena pihak desa merupakan salah satu pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah dalam melihat keberlangsungan hidup masyarakat sehari-hari. Sebagai petugas operator atau yang menaungi DTSEN maka dia lebih dekat dengan masyarakat, segala keluhan kesah masyarakat mengenai bantuan maka akan didiskusikan atau disampaikan kepada Pak Yoga. Pak Yoga sendiri dalam pekerjaan utamanya sebagai petugas operator di Desa Malangan, juga memiliki kewajiban lainnya dalam mengurus lahan persawahan milik pribadi, pada dasarnya Desa Malangan memiliki lahan persawahan yang cukup besar sehingga menghasilkan panen yang tinggi di setiap tahunnya. Maka dari itu, meskipun memiliki pekerjaan utama sebagian besar dari mereka tetap memiliki tanah atau lahan persawahan yang ditanami dengan padi untuk kestabilan ekonomi keluarga dan jaminan masa tua.

2.3.6 Fajria Ramdani (Pendamping PKH)

Mbak Fajria atau biasanya dipanggil dengan nama Mbak Faya, merupakan petugas Kecamatan Bulu yang ditugaskan untuk menjadi pendamping PKH di Desa Malangan. Mbak Faya mendampingi beberapa kelompok PKH di Desa Malangan, salah satunya adalah Kelompok 7. Sebagai pendamping PKH, Mbak Faya memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat penerima bantuan PKH untuk memahami bagaimana alur penerimaan bantuan. Menjadi pendamping PKH kini dengan usia sekitar 35 tahun dan harus menghadapi berbagai macam karakteristik masyarakat dengan berbagai kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan bantuan sosial PKH. Mbak Faya menjadi pendamping PKH sejak dibentuknya program PKH di wilayah Kecamatan Bulu. Menjadi pendamping PKH merupakan salah satu tugas yang penuh tanggung jawab, selain harus bertanggung jawab atas banyak orang, pendamping juga harus bisa memastikan bahwa anggotanya dapat menerima informasi dengan baik dan tidak mengalami kendala.

2.3.7 Dwi Sulistyowati (Pendamping PKH)

Mbak Dwi Sulistyowati atau biasanya dipanggil dengan mama Mbak Sulis merupakan salah satu pendamping di Kecamatan Bulu, kabupaten Sukoharjo yang ditugaskan secara langsung oleh Kementrian Sosial untuk menjadi pendukung keberjalanan program bantuan sosial PKH di Kecamatan Bulu. Mbak Sulis merupakan salah satu pendamping baru yang bertugas di Kecamatan Bulu setelah adanya beberapa perubahan sistem dari program PKH itu sendiri. Mbak Sulis menjadi pendamping kelompok PKH sejak sistem pencairan dana bantuan menggunakan ATM, sehingga hal tersebut dianggap lebih mudah dibanding dengan pendamping yang sudah bertugas sebelum sistem pencairan dana bantuan dengan menggunakan ATM.

2.3.8 Edward Oktavian Wahyu Prabowo (Pendamping PKH)

Mas Edward atau biasanya dipanggil dengan nama Mas Edo yang juga merupakan salah satu pendamping di Kecamatan Bulu , Kabupaten Sukoharjo. Meskipun Mas Edo belum memiliki pengalaman waktu yang sama seperti Mbak Faya dalam bertugas sebagai pendamping, dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping Mas Edo memiliki banyak pengalaman mengenai perjalanannya dalam

bertugas sebagai pendamping kelompok PKH. Bahkan sebelum terdapat banyak pendamping kelompok PKH yang tersebar di Kecamatan Bulu, mereka khususnya Mas Edo sendiri menangani beberapa desa sekaligus dalam melaksanakan pendampingan program. Namun, saat ini setelah adanya persebaran penugasan pendampingan program PKH maka mereka memiliki tanggung jawab yang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Rata-rata dari mereka bertugas dalam mendampingi 2-3 desa di Kecamatan Bulu.

PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO